



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

E-mail : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-78/DISKOPUKM/500.3.1/04/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.maka Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang undang...

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) ;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Pemberian Hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) ;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2021. Tentang Kedudukan Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ;

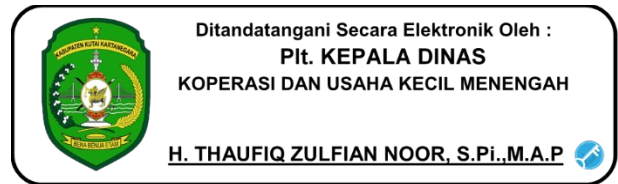
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu melaksanakan tugas tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Tekhnis Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan kegiatan / Sub Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan Barang /Jasa pada Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang mengatur Pengadaan Barang / Jasa.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 14 April sampai dengan 31 Desember 2025. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 15 April 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
5. Masing masing PPTK yang bersangkutan
6. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-78/DISKOPUKM/500.3.1/04/2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.839.945,-	Martince, SE	
2	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.874.663,-	Martince, SE	
3	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.232.432,-	Martince, SE	
4	2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	16.081.078,-	Martince, SE	
5	2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	131.859.104,-	Martince, SE	
6	2.17.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.202.368,-	Martince, SE	
	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.213.827.639	Sri Herlidawati, S. Sos	
2	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.055.401,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
3	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102.763.496,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
4	2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.999.640,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
	2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.755.456,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
2	2.17.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	49.761.318,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
3	2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.822.094,-	Sri Herlidawati, S. Sos	
	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.512.984,-	Surya Kasma Atmaja, S.H	
	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.531,-	Sri Astuty,S.P.,M.P	
2	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.914.669,-	Sri Astuty,S.P.,M.P	
3	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.317.397,-	Surya Kasma Atmaja, S.H	
4	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.071.064,-	Sri Astuty,S.P.,M.P	
5	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	Surya Kasma Atmaja, S.H	
6	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.915.952,-	Sumiati, SE	
7	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.287.142,-	Surya Kasma Atmaja, S.H	
8	2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	284.236.450,-	Sri Astuty,S.P.,M.P	

NO	PRORGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.989.870	Milyanti,SE	
	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.223.188,-	Sumiati, SE	
2	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.282.727,-	Sumiati, SE	
	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.638.800,-	Sumiati, SE	
2	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.749.078,-	Milyanti,SE	
3	2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.999.143,-	Milyanti,SE	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
1	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	269.834.400,-	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	134.220.521,-	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.674.497,-	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	897.855.600,-	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	112.577.169,-	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	892.450.937,-	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
1	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	104.165.732,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
2	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	336.232.891,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
3	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	779.717.545,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
4	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	51.412.174,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.507.256.628,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	

NO	PRORGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	KETERANGAN
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
1	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. Sumber Daya Manusia. serta Desain dan Teknologi	3.677.870.877,-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	

Tenggarong, 15 April 2025

